

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media.
- Prabawati, I. et al. 2020. *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya: UNESA University Press.
- Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen : Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga
- Subarsono, A. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

### Jurnal

- Bastaman, K. 2019. *Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang*. *The World of Public Administration Journal*. Vol. 1, Issue 1. (9 <https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik>)
- Baihaki & Hidayat, A. 2021. *Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Cilegon*. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*. Vol. 30, No. 2 (<https://journal.moestopo.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/1974/914>)
- Dariatno, Estro. 2020. *Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vektor autoregressive*. Vol.22, No.2 (<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>)
- Faturrahman, M. 2016. *Faktor Birokrasi dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik*. *Jurnal : Keilmuwan Manajemen Pendidikan* (<https://www.neliti.com/publications/256485/faktor-birokrasi-dalam-keberhasilan-implementasi-kebijakan-publik>)
- Hertati, L. 2021. *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 7, No. 2 (<https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/article/view/560>)
- Kumala, R. 2019. *Analisis Efektivitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi*. *Jurnal Reformasi Administrasi*. Vol.6, No.1 (<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/331>)

- Mulyati, Y., & Ismanto, J. 2021. *Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud*. JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia).Vol.4,No.2  
(<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/10333/pdf>)
- Purwanto,S.A. 2016. *Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau*. Jurnal Ekonomi Manajemen, Vol. 10, No. 1. STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb  
(<https://adoc.pub/pengaruh-pajak-reklame-terhadap-peningkatan-pendapatan-asli-.html>)
- Risky, Angi.,Sujiyanto. 2017. *Pelaksanaan Pengawasan Penempatan Papan Reklame Di Kota Pekanbaru*. Journal Articiel  
(<https://www.neliti.com/publications/31223/pelaksanaan-pengawasan-penempatan-papan-reklame-di-kota-pekanbaru>)
- Riyant Grahayudha, G. *et al.* 2014. *Pengaruh Insentif Terhadap Motivasi Kerja*. Jurnal Administrasi dan Bisnis. Vol 8, No.1  
(<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab>)
- Sri, Bahrul. 2016. *Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Trenggalek*. Karya Ilmiah Dosen. Vol.2, No.2  
(<https://journal.stkipgritrenggalek.ac.id/index.php/kid/article/view/87>)
- Triantoro, A. 2010. *Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung*. Fokus Ekonomi. Vol. 5, No.1 (<https://stiepena.ac.id/>)
- Wardani, K.D & Wati, E. 2018. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Nominal. Vol.7, No.1  
(<https://journal.uny.ac.id/>)
- Wicaksono, A. 2017. *Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia*. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol. 10, No. 1, 167-180. (<https://journal.uinjkt.ac.id/>)
- Yalia, M. 2014. *Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional di Jawa Barat*. Patanjala. Vol. 6, No. 1 (<https://media.neliti.com/>)

### **Skripsi**

- Sri Madu Rakyato. 2022. *Penyelenggaraan Reklame Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman*, diakses pada tanggal 21 Maret 2023.
- Tomi Dwi Saputra, 2015. *Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau*. diakses pada tanggal 21 Maret 2023.

### **Peraturan Pemerintah**

- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 297 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah, yang diperbarui dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 29 Tahun 2011.

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 Atas Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peraturan ini mengatur tentang perpajakan di daerah terutama jenis-jenis pajak daerah dan siapa yang berhak memungut pajak daerah tersebut.

### **Website**

Admin JDIH BPK, 2022. Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diakses pada tahun 2022, melalui web : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>.

Admin JDIH BPK, 2022. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame. Diakses pada tahun 2022, melalui web: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/219928/pegub-prov-dki-jakarta-no-24-tahun-2022>.

Admin Bapenda Jakarta, 2019. Struktur Organisasi. Diakses pada tahun 2019, melalui web : <https://bprd.jakarta.go.id/struktur-organisasi>.

Admin Novani Putri, 2022. Pajak Reklame Naik Hingga 275 Persen Sejumlah Pengusaha Menolak. Diakses pada tahun 2022, melalui web: <https://www.pajakku.com/read/62f9f901a9ea8709cb18bae0/Pajak-Reklame-Naik-Hingga-275-Persen-Sejumlah-Pengusaha-Menolak>.

Admin Dewa Ayu Intan, 2019. UU PDRD dengan amanat Undang-Undang 1945 Pasal 23A. Diakses pada tahun 2019, melalui web: <https://www.pajakku.com/read/5d9ee689b01c4b456747b6d2/Pajak-dari-oleh-dan-untuk-Rakyat>.

Admin Bapenda Jakarta, 2017. Dinas Pelayanan Pajak Menjadi Badan dan Retribusi Daerah, Diakses pada tanggal 3 Januari 2017, melalui web: <https://dpp.jakarta.go.id/berita/dinas-pelayanan-pajak-menjadi-badan-pajak-dan-retribusi-daerah>.

Admin Bapenda Jakarta, 2019. Sejarah Bapenda. Diakses pada tahun 2019, melalui web : <https://bprd.jakarta.go.id/sejarah>.

## SURAT IZIN PEMOHON PENELITIAN



UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520  
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719  
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

Nomor : /S3 /WD/V/2023 Jakarta, 24 Mei 2023  
Lamp : -  
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Kepada Yth : Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru  
Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan Blok A Lantai 10, Jl. Prapanca Raya,  
No.9

Dengan hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama : Delfilarosa Noor Jamila  
Nomor Induk Mahasiswa : 193515516059  
Prodi/Konsentrasi : Administrasi Publik  
Alamat Rumah : Jl. Swadaya I RT 006/009 No.53 Pejaten Timur Pasar Minggu  
Jakarta Selatan  
HP : 085882847430  
Email : [delfidac93@gmail.com](mailto:delfidac93@gmail.com)

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul: Penerapan Peraturan Gubernur No.24 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame di Jakarta Selatan (Studi pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru).

Dengan Dosen Pembimbing : Dr. Heru Dian Setiawan, ST., M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya. Demikian atas perhatiannya dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan,  
  
Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Bersama Bapak Indra Satria, S.H., M.H (Kepala Unit Pelayanan Pemungutan  
Pajak Daerah Kebayoran Baru)



Bersama Bapak Siddiq Wicaksono, S.E (Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Unit  
Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru)





Bersama Bapak Sufiandi, S.H (Staff Pelaksana Pendataan Unit Pelayanan  
Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru)



Bersama Bapak Edi Cahyono (Wajib Pajak Reklame Papan *Billboard*  
Mandiri Sekuiritas)



Bersama Bapak Hengky Setiaji (Wajib Pajak Reklame Papan *Billboard* The Pakubuwono House)



Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

**Judul Penelitian : Penerapan Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2022  
Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame di Jakarta Selatan (Studi pada Unit  
Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru).**

Penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan mengacu pada teori penerapan kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2014) dengan 6 indikator, yaitu : (1) Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran Kebijakan dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumber-Sumber Kebijakan, (3) Karakteristik Organisasi Pelaksana, (4) Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana, (5) Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan, (6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.

Dimensi	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan Pegawai Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru	Pertanyaan Wajib Pajak Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru
Penerapan Pergub No. 24 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame di Jakarta Selatan (Studi pada Unit Pelayanan Pemungutan	Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan	1. Tujuan Kebijakan	1. Apa tujuan dari Pergub No. 24 Tahun 2022 ini? Ada tujuan lain di luar dari Pergub ini? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak?	1. Apakah dengan dikeluarkan Pergub No. 24 Tahun 2022 ini bapak/ibu lebih taat membayar pajak? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya bapak/ibu?
		2. Pelaksanaan Kebijakan	1. Apakah Pergub No. 24 Tahun 2022	



Pajak Daerah Kebayoran Baru)			sudah dilaksanakan dengan baik? 2. Bagaimana <i>Standar Operasional Prosedur</i> dalam pelaksanaan kebijakan? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak?	
Sumber-Sumber Kebijakan	1. Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pegawai dalam mengimplementasikan Pergub 4 Tahun 2022 tersebut? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak?		1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kualitas sumber daya manusia di UPPPD Kebayoran Baru? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya bapak/ibu?
	2. Anggaran	1. Apakah ada anggaran khusus untuk penerapan Pergub ini di UPPPD Kebayoran Baru? 2. Apakah ada insentif dari Pergub No. 24 Tahun 2022? 3. Apakah anggaran sudah cukup untuk mendorong pegawai di UPPPD Kebayoran Baru?		
Karakteristik Organisasi Pelaksana	1. Struktur Birokrasi	1. Bagaimana struktur birokrasi di UPPPD Kebayoran Baru ini pak? Apa saja divisi yang terlibat		1. Menurut Bapak/Ibu, apakah struktur birokrasi UPPPD Kebayoran Baru ini sudah mampu dalam menjalankan

			<p>dalam pelaksanaan pajak reklame?</p> <p>2. Apakah petugas diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan?</p>	<p>Kebijakan Pergub No. 24 Tahun 2022 tersebut?</p>
		<p>2. Hubungan antar pelaksana kebijakan</p>	<p>1. Bagaimana hubungan antar para pelaksana kebijakan baik eksternal maupun internal? Kira-kira ada kendala ga pak? Bagaimana solusinya pak?</p>	
<p>Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana</p>	<p>1. Motivasi Para Pelaksana</p>	<p>1. Bagaimana cara memotivasi para pegawai pak?</p> <p>2. Apakah dengan diberikannya insentif para pegawai akan semangat bekerja?</p>	<p>1. Bagaimana motivasi yang diberikan pegawai kepada wajib pajak? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak/bu?</p> <p>2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sikap petugas pelaksana di UPPPD kebayoran Baru?</p>	
	<p>2. Perilaku para Pelaksana</p>	<p>1. Bagaimana perilaku para pelaksana di lapangan pak? Perilakunya seperti apa? Apakah ada kendalanya pak? Apa yang sudah bapak lakukan dalam menyikapi perilaku para pegawai tersebut? Bagaimana solusinya?</p>		
<p>Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana</p>	<p>1. Koordinasi dan Komunikasi Pelaksana</p>	<p>1. Bagaimana komunikasi antar petugas pelaksana? Apakah ada mis komunikasi petugas dan wajib pajak? Bagaimana solusinya pak?</p>	<p>1. Apakah koordinasi dan komunikasi petugas pelaksana dan wajib pajak sudah berjalan dengan baik? Bagaimana solusinya pak/bu?</p>	

		2. Komitmen Pelaksana	1. Apakah para petugas pelaksana memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya?	2. Apakah ada mis komunikasi antara petugas pelaksana dan wajib pajak? Bagaimana solusinya pak/bu?
Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	1. Lingkungan Sosial	1. Bagaimana kesiapan masyarakat/wajib pajak menerima Pergub No.24 Tahun 2022? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak?	1. Bagaimana kesiapan masyarakat/wajib pajak menerima Pergub No.24 Tahun 2022? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak?	1. Bagaimana kesiapan masyarakat/wajib pajak menerima Pergub No.24 Tahun 2022? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak?
	2. Lingkungan Ekonomi	1. Bagaimana kesiapan masyarakat/wajib pajak menerima Pergub No.24 Tahun 2022? Apakah ada kendala pak? Bagaimana solusinya?	1. Bagaimana kesiapan masyarakat/wajib pajak menerima Pergub No.24 Tahun 2022? Apakah ada kendala pak? Bagaimana solusinya?	1. Bagaimana kesiapan masyarakat/wajib pajak menerima Pergub No.24 Tahun 2022? Apakah ada kendala pak? Bagaimana solusinya?
	3. Lingkungan Politik	1. Apa saja bentuk dukungan Pemda terhadap DPRD terkait pajak reklame?	1. Apakah perusahaan bapak/ibu melakukan koneksi politik agar beban pajak yang dikeluarkan lebih sedikit?	2. Apakah insentif yang tertera dalam Pergub No. 24 Tahun 2022 ini meringankan beban pajak? Dan menjadikan bapak/ibu taat membayar pajak?

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Indra Satria, S.H., M.H

Jabatan : Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah  
(UPPPD) Kebayoran Baru

Tanggal Wawancara : 13 Juni 2023

---

---

### Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran Kebijakan dan Tujuan Kebijakan

1. Apa tujuan dari Pergub No. 24 Tahun 2022 ini? Ada tujuan lain di luar dari Pergub ini? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak?

Jawab : “Pergub No.24 Tahun 2022 ini sebenarnya perubahan dari pergub No.27 Tahun 2014, pergub No.27 itu lahir dengan kondisi perhitungan nilai NSRnya sebelum kondisi Covid-19, nah Pergub No.24 itu untuk menyeimbangkan dengan kondisi saat ini tapi bagaimana pun juga tetap ada perbedaan nilainya yaitu naik. Di tahun 2022 ini realisasi penerimaannya belum mencapai target karena memang adanya pergub itu, banyak reklame yang tutup juga akibat kenaikan tarif kelas jalan ini mereka gak sanggup bayarnya, ada juga wajib pajak yang gak tutup tapi dia gak melakukan pendaftaran atau perpanjangan, makanya pembayaran pajaknya jadi berkurang dan gak tercapai. Tujuannya tetap untuk menggalakan perekonomian khususnya DKI Jakarta, sehingga orang tetap beriklan, iklan kan salah satu sarana ampuh dari para pelaku usaha untuk mengenalkan produknya, jadi sebenarnya yang namanya reklame itu semua tuh sudah

dianggarkan oleh perusahaan jadi sebenarnya sudah dipersiapkan dan telah diperhitungkan.”

2. Apakah Pergub No. 24 Tahun 2022 sudah dilaksanakan dengan baik?

Jawab : “Ya kita sih tetap melaksanakan ya kalau misalkan baik tentu kita sebagai pelayannya pelaksanaannya berusaha dengan baik.”

3. Bagaimana *Standar Operasional Prosedur* dalam pelaksanaan kebijakan?

Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak?

Jawab : “SOP nya sebenarnya gak ada yang berubah semua standar seperti pelaksanaan sebelum adanya Pergub No.24 Tahun 2022 dari mulai pendaftaran dan sebagainya, hanya yang berbeda pemberian stimulusnya itu tanpa permohonan jadi ketika mendaftarkan untuk di area tertentu sebagai pengenal usaha itu langsung mendapatkan tanpa permohonan.”

#### **Sumber-Sumber Kebijakan**

1. Bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pegawai dalam mengimplementasikan Pergub 24 Tahun 2022 tersebut? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak?

Jawab : “Pergub No. 24 Tahun 2022 ini sebenarnya kalau dari implementasi dia sama pelaksanaannya yang berbeda hanya penerapan nilainya dan itu pun telah komputerais jadi teman-teman pelayanan hanya tinggal input aja gak usah ngitung ulang jadi gak perlu pelatihan khusus, tapi memang jumlah SDMnya terbatas gak sebanding sama jumlah wilayah Kabupaten Baru terutama SDM di pelayanan dan di lapangan.”



2. Apakah ada anggaran khusus untuk penerapan Pergub ini di UPPPD Kebayoran Baru?

Jawab : “Anggaran sih ada cuma gak terlalu banyak .”

3. Apakah ada insentif dari Pergub No. 24 Tahun 2022?

Jawab : “Insentif pengenalan usaha langsung kita berikan 50%. Itu perhitungannya dari sistem jadi kita gak usah ngitung lagi dan tidak usah mengajukan permohonan untuk mendapatkan itu ketika kita input ketika itu merupakan suatu pengenalan usaha langsung diberikan.”

4. Apakah anggaran sudah cukup untuk mendorong pegawai di UPPPD Kebayoran Baru?

Jawab : “Belum cukup ya kalau anggaran untuk pengawasan reklame.”

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

1. Bagaimana struktur birokrasi di UPPPD Kebayoran Baru pak? Apa saja divisi yang terlibat dalam pelaksanaan pajak reklame pak?

Jawab : “Kalau struktur birokrasi sudah bagus dalam menjalankan tugasnya ya sesuai divisi masing-masing seperti divisi pemroses pelayanan dan penetapan, pengolahan data dan pendataan, dan pengolahan data penagihan, itu setiap divisi memiliki tanggung jawab khusus dalam proses pelayanan pajak reklame.”

2. Apakah petugas diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan? Apakah ada kendala?

Jawab : “Semua sudah dituangkan dalam bentuk peraturan gubernur jadi gak boleh ada keputusan di luar dari pergub karena namanya pajak, pajak

itu segala sesuatu diatur, kalau keputusan pemungutan pajak di luar peraturan perpajakan namanya pungli.”

3. Bagaimana hubungan antar para pelaksana kebijakan baik eksternal maupun internal? Kira-kira ada kendala ga pak? Bagaimana solusinya pak?

Jawab : “Hubungan eksternalnya ya UPPPD Kebayoran Baru ini bekerja sama dengan dinas-dinas terkait ya seperti BAPENDA, DINAS PU untuk pembangunan jalan, DINAS TEKNIS, Dinas Sumber Daya Air untuk pembangunan saluran air, selokan, dan bendungan, Satpol PP, DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BANK DKI karena pajak hanya memungut melalui BANK DKI dengan rekening kas daerah yang akan masuk ke APBD. Kemudian kalau untuk hubungan internalnya sesama divisi disini saling bekerja sama secara tim dan gak ada masalah, *fine-fine* aja.”

#### **Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana**

1. Bagaimana cara memotivasi para pegawai pak?

Jawab : “Di luar sana banyak orang belum punya pekerjaan, banyak orang yang mau jadi PNS kalian yang sudah ada di sini jangan sia-siakan karena kalian itu adalah segelintir orang dari orang-orang yang ingin ada di sini. Kalian sudah dapat keistimewaan jangan sia-siakan.”

2. Apakah dengan diberikannya insentif para pegawai akan semangat bekerja?

Jawab : “Itu tidak bisa dipungkiri ya kan karena salah satu hal namanya orang bekerja tentu ingin memperoleh *income* tentu bukan *income* yang pas-

pasan, mungkin ada sedikit untuk rekreasi, hiburan ya kalau di kasih lebih sehingga kita juga tidak mencari-cari dari para wajib pajak.”

3. Bagaimana perilaku para pelaksana di lapangan pak? Perilakunya seperti apa? Apakah ada kendalanya pak? Apa yang sudah bapak lakukan dalam menyikapi perilaku para pegawai tersebut?

Jawab : “Ya saya hanya bisa menyampaikan teman-teman yang ke lapangan yaitu hati-hati berbicara kepada para wajib pajak jangan membuat *statment* yang nanti malah akan menjadi bahan berita jadi saya harap mereka seperti itu. Saya biasanya memberi arahan kepada teman-teman jangan bekerja berdasarkan kebiasaan tapi karena kita ini pepajakan, bekerja berdasarkan aturan nah sehingga bisa dipertanggungjawabkan.”

### **Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan**

1. Bagaimana komunikasi antar petugas pelaksana? Apakah ada mis komunikasi petugas dan wajib pajak? Bagaimana solusinya pak?

Jawab : “Ya bisa dilihat sendiri mereka saling bercanda, santai kan karena saya juga santai orangnya gak ada batas baik yang D3 maupun yang S1. Kalau mis komunikasi petugas dan wajib pajak itu umum makanya saya bekali temen-temen khususnya di pelayanan dengan pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan, sehingga ketika berbicara itu bukan dari petugas pajak ini dari ketentuan jadi seandainya menolak juga bukan karena alasan subjektif tapi karena memang peraturannya tidak memungkinkan.”

2. Apakah para petugas pelaksana memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan?

Jawab : “Kita harus memiliki komitmen yang sama sehingga kita bisa mencapai tujuan bersama bukan tujuan kepala unit tapi tujuan dari UPPPD dalam arti kecil kalau dalam arti luas tentu BAPENDA lagi.”

### **Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

1. Bagaimana kesiapan masyarakat/wajib pajak menerima Pergub No.24 Tahun 2022? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak? Dari sisi sosial.

Jawab : “Jadi sebelumnya itu memang sudah pernah kita sosialisasikan ketika itu terutama wajib pajak yang resistensi jadi kita sudah mengundang sebelumnya di Abdul Muis itu para biro jasa tapi ketidakpuasan itu hal yang wajar yang namanya pajak itu orang bisa tiba-tiba bilang gak punya uang. Kan kalau yang namanya sosialisasi wajib pajak itu gak semuanya diundang ya, sehingga pergub ini menyebabkan kurangnya sosialisasi petugas pelaksana/pegawai kepada wajib pajak yang belum mengetahui adanya kenaikan tarif kelas jalan ini ya harusnya pergub ini diinfokan melalui media cetak dan media sosial, sehingga ini akan memudahkan wajib pajak mengetahui adanya pergub 24 ini.”

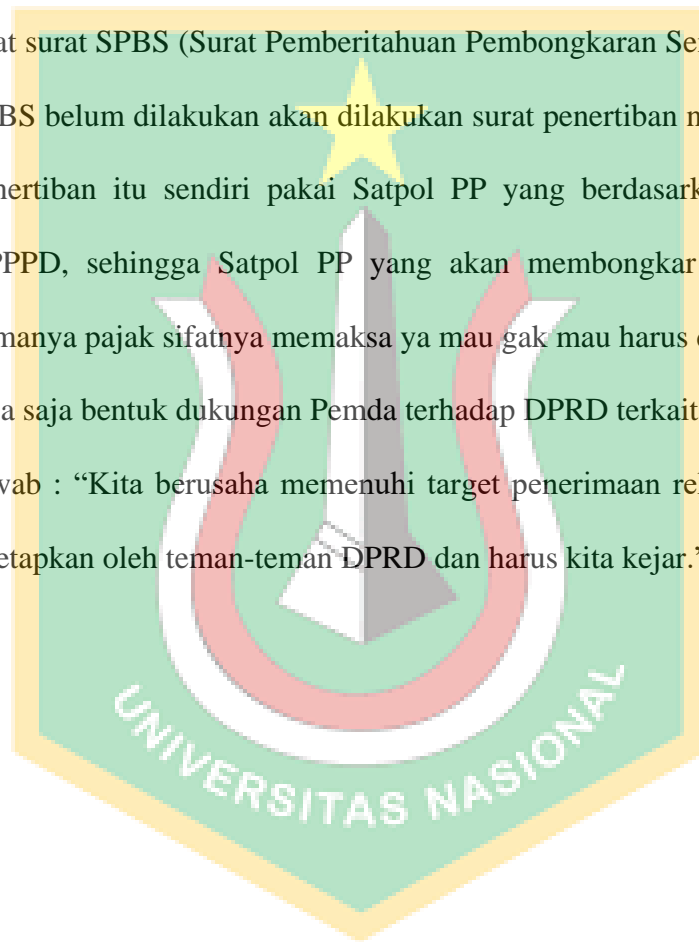
2. Bagaimana kesiapan masyarakat/wajib pajak menerima Pergub No.24 Tahun 2022? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak? Dari sisi ekonomi.

Jawab : “Ya semua wajib pajak kaget ya adanya pergub yang naiknya signifikan ini. Ada sebagian yang memperkecil ukuran reklamenya dan ada juga yang bongkar sendiri akibat terlalu besar beban pajaknya meskipun

memang adanya insentif 50% itu. Kalau mereka gak bayar-bayar kan ada denda juga dan sudah jatuh tempo. Bisanya kita kasih surat himbauan dulu bahwa reklame mereka akan berakhir masa pajaknya dan apabila belum diperpanjang juga kita kasih surat panggilan, kalau gak ada respon juga kasih lagi surat panggilan kedua. Dan apabila surat belum diproses juga, buat surat SPBS (Surat Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri) dan apabila SPBS belum dilakukan akan dilakukan surat penertiban nah untuk wilayah penertiban itu sendiri pakai Satpol PP yang berdasarkan perintah dari UPPPD, sehingga Satpol PP yang akan membongkar reklamenya. Ini namanya pajak sifatnya memaksa ya mau gak mau harus dibayar.”

3. Apa saja bentuk dukungan Pemda terhadap DPRD terkait pajak reklame?

Jawab : “Kita berusaha memenuhi target penerimaan reklame yang telah ditetapkan oleh teman-teman DPRD dan harus kita kejar.”





Nama Informan : Bapak Siddiq Wicaksono, S.E

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan  
Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru

Tanggal Wawancara : 8 Juni 2023

---

---

### **Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran Kebijakan dan Tujuan Kebijakan**

1. Apa tujuan dari Pergub No. 24 Tahun 2022 ini? Ada tujuan lain di luar dari Pergub ini? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak?

Jawab : “Tujuannya untuk meningkatkan potensi pajak reklame yang berkeadilan disitu ada perubahan NSR misalkan di protokol A semula 25.000 jadi 80.000 sekarang gak ada produk dan non produk dan disini ada akses keadilan yang nama usaha dapat pengenaan 50% jadi tetep naik lah dan lebih tinggi. Kendalanya beberapa wajib pajak ada yang belum melakukan perpanjangan untuk tayangan reklamenya karena ada perubahan NSR itu karena gimana NSR kan keputusan ada di Gubernur, jadi kita himbau untuk melakukan perpanjangan kalau gak melakukan perpanjangan kita kasih surat-surat perintah bongkar sendiri. Solusinya kalau dari kami dihimbau kepada wajib pajak yang belum melakukan perpanjangan pajak reklame (status Belum Daftar Ulang) agar segera mendaftarkan perpanjangan pajak reklamenya.”

2. Apakah Pergub No. 24 Tahun 2022 sudah dilaksanakan dengan baik?

Jawab : “Sudah diterapkan dengan baik berlakunya mulai 10 Juni 2022.”

3. Bagaimana *Standar Operasional Prosedur* dalam pelaksanaan kebijakan? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak?

Jawab : “SOP kita laksanakan sesuai ketentuan yang ada, cuma untuk cara pendaftaran reklame bisa secara manual wajib pajak datang ke loket UPPPD Kebayoran Baru atau pendaftaran secara online tapi mayoritas sih secara manual.”

#### **Sumber-Sumber Kebijakan**

1. Bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pegawai dalam mengimplementasikan Pergub 24 Tahun 2022 tersebut? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak?

Jawab : “Pengalaman kita rata-rata udah berpengalaman kedua dari sini udah dilatih melalui pendidikan apenda, sosialisasi terkait dengan SOP, dan penggunaan aplikasi SIMR (Sistem Informasi Manajemen Pajak Reklame) disini kan pegawai minimal D3 dan S1 dari kedudukan sendiri ya. Kalau untuk mengenai anggaran itu ada, tapi tidak terlalu banyak biasanya untuk sosialisasi aja ke wajib pajak dan juga untuk pemotongan beberapa tiang reklame saja. Contohnya reklame yang benar-benar menyalahi aturan itu akan dilakukan pemotongan tiang dan penertiban.”

2. Apakah ada anggaran khusus untuk penerapan Pergub ini di UPPPD Kebayoran Baru?

Jawab : “Ada anggaran, paling sosialisasi kepada wajib pajak dengan mengundang wajib pajak dan sudah kita laksanakan pada tahun 2022 sejak berlakunya pergub tapi tidak terlalu banyak.”

3. Apakah ada insentif dari Pergub No. 24 Tahun 2022?

Jawab : “Ada insentif berupa pengenaan 50% untuk pengenal usaha atau profesi.”

4. Apakah anggaran sudah cukup untuk mendorong pegawai di UPPPD Kebayoran Baru?

Jawab : “Belum cukup kalo anggaran untuk pengawasan ya tetapi memang jumlah SDM di UPPPD terbatas untuk pelayanan.”

#### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

1. Bagaimana struktur birokrasi di UPPPD Kebayoran Baru pak? Apa saja divisi yang terlibat dalam pelaksanaan pajak reklame pak?

Jawab : “Untuk struktur birokrasi disini sudah bagus dan baik saling bekerja sama dalam tim ya dan sudah kami berikan pelatihan khusus juga supaya lebih informatif dalam menyampaikan pergub ini ke wajib pajak. Struktur birokrasi ini memiliki beberapa divisi yaitu divisi pemeroses pelayanan dan penetapan, pengolah data dan pendataan, dan pengolah data penagihan kemudian setiap divisi tersebut memiliki tanggung jawab khusus dalam proses pelayanan pajak reklame.”

2. Apakah petugas diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak?

Jawab : “Kalau mengambil keputusan yaitu tadi sesuai dengan peraturan jadi tidak boleh ada keputusan di luar pergub misalkan ada wajib pajak yang ingin merubah ukuran reklamenya yaitu wajib pajak bersurat dengan memberi tahu bahwa ukuran pajak reklamenya berubah, ada yang seperti itu

karena kan mahal pajaknya. Kita sebagai petugas melakukan penelitian lapangan dengan melakukan pengukuran benar gak tuh panjangnya, lebarnya, ketinggianya dan dituangkan didalam berita acara setelah itu petugas membuat LHP (Laporan Hasil Penelitian lapangan) dan disposisi oleh Kepala UPPPD untuk dilakukan penginputan kedalam aplikasi SIMR, kalau didalam perpanjangan dia gak melakukan perubahan ukuran kita gak perlu ke lapangan.”

3. Bagaimana hubungan antar para pelaksana kebijakan baik eksternal maupun internal? Kira-kira ada kendala ga pak? Bagaimana solusinya pak?

Jawab : “Hubungan internal sesama pegawai baik, harmonis, dan saling bersinergi, kalau eksternal UPPPD ini bekerja sama dengan BAPENDA, DINAS PU untuk pembangunan jalan, DINAS TEKNIK, Dinas Sumber Daya Air untuk pembangunan saluran air, selokan, dan bendungan, Satpol PP, DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BANK DKI karena pajak hanya memungut melalui BANK DKI dengan rekening kas daerah yang akan masuk ke APBD. Kami semua satu linear yang bertujuan untuk target. Kalau untuk kinerja kerjasama kami dari pihak UPPPD Kebayoran Baru sangat baik dengan mereka dan sudah terjalin cukup lama.”

### **Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana**

1. Bagaimana cara memotivasi para pegawai pak?

Jawab : “Kita diberikan tunjangan dan insentif oleh Pemprov DKI, setiap bulan dapet gaji dan tunjangan serta setiap 3 bulan dapet insentif apabila

target 3 bulan itu tercapai kalau tidak mencapai target ya gak dapet. Kalau yang tunjangan tadi misalnya telat masuk kantor atau gak masuk kantor ya dipotong.”

2. Apakah dengan diberikannya insentif para pegawai akan semangat bekerja?

Jawab : “Pastilah.”

3. Bagaimana perilaku para pelaksana di lapangan pak? Perilakunya seperti apa? Apakah ada kendalanya pak? Apa yang sudah bapak lakukan dalam menyikapi perilaku para pegawai tersebut? Bagaimana solusinya?

Jawab : “Sopan, santun, ramah, semangat dan sesuai ketentuan yang ada. Melakukan pembinaan atau *briefing*, melakukan validasi kegiatan atau pekerjaan harian. Kendalanya mah di wajib pajak yang belum bayar pajak dan nunggak untuk tercapai kan kendalanya disitu. ”

### **Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan**

1. Bagaimana komunikasi antar petugas pelaksana? Apakah ada mis komunikasi petugas dan wajib pajak? Bagaimana solusinya pak?

Jawab : “Komunikasi antar petugasnya sudah bagus tapi kalau mis komunikasi petugas dan wajib pajak kadang ada juga, balik lagi karena wajib pajak juga belum paham apa yang disampaikan oleh petugas jadi iya iya aja ujung-ujungnya dia sendiri yang bingung kita juga yang kena tetapi itu hanya beberapa.”

2. Apakah para petugas pelaksana memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan?



Jawab : “Punya komitmen kan kita duduk disini tau jam moral dan ada motivasi untuk mendapat insentif itu tadi.”

### **Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

1. Bagaimana kesiapan masyarakat/wajib pajak menerima Pergub No.24 Tahun 2022? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak? Dari sisi sosial.

Jawab : “Ada yang menerima dan ada yang merasa keberatan kalau keberatan ya itu tadi pemilik reklame yang *billboard* karena meningkatnya ketentuan pajak reklame NSR itu. Meskipun sudah dapat insentif 50% dan dapat 50% kalau yang indoor tetapi ini beban pajaknya 2x lipat dari tahun sebelumnya jadi ini gede banget. Karena pergub ini kurang sosialisasi ke wajib pajak jadinya mereka banyak yang gak tau dan kaget pastinya. Namanya pajak mau gak mau harus dibayar sesuai pergub. Kalau dia gak perpanjang pendaftaran kita bisa bersurat ke satpol PP untuk melakukan pembongkaran atau penertiban.”

2. Bagaimana kesiapan masyarakat/wajib pajak menerima Pergub No.24 Tahun 2022? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak? Dari sisi ekonomi.

Jawab : “Beberapa wajib pajak sih kaget ya tapi tetep mendaftarkan pajak (perpanjangan) walaupun sebagian memperkecil ukuran reklamennya biar bayarnya ringan. Kalau ada yang komplek kita memberikan sosialisasi, pemberitahuan, dan pemahaman kepada wajib pajak baik melalui penjelasan lisan maupun surat.”

3. Apa saja bentuk dukungan Pemda terhadap DPRD terkait pajak reklame?

Jawab : “Berusaha mencapai target penerimaan pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBD (DPRD dan Gubernur) dan kita melaksanakan tugas untuk mencapai target itu.”



Nama Informan : Bapak Sufiandi, S.H

Jabatan : Staff Pelaksana Pendataan Unit Pelayanan Pemungutan  
Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru

Tanggal Wawancara : 8 Juni 2023

---

---

### **Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran Kebijakan dan Tujuan Kebijakan**

1. Apa tujuan dari Pergub No. 24 Tahun 2022 ini? Ada tujuan lain di luar dari Pergub ini? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak?

Jawab : “Mengontrol reklame di daerah tertentu yang utamanya sih menggali potensi PAD, intinya meningkatkan potensi PAD karena untuk mengimbangi pembebasan dan pengurangan tentunya hal ini menyebabkan berkurangnya PAD di Pemprov DKI nah untuk mengimbangi reklame ini dinaikkan tarif kelas jalannya. Tapi kenyataannya di tahun 2022 realisasinya gak mencapai target penerimaan pajak karena wajib pajak merasa keberatan dan akhirnya lebih banyak yang mencopot reklamennya terutama pada usaha UMKM ya ini sangat berpengaruh pada target penerimaan sih. Kendalanya di sosialisasinya yang kurang dan kalo di lapangan itu kendalanya ngarahin wajib pajak yang tidak mengerti pergub ini. Solusinya dengan cara meningkatkan sosialisasi khususnya petugas pelayanan harus benar-benar menguasai peraturan, mencari potensi baru atau ekstensifikasi.”

2. Apakah Pergub No. 24 Tahun 2022 sudah dilaksanakan dengan baik?

Jawab : “Saya rasa sih udah mampu dalam melaksanakan pergub ini.”

3. Bagaimana *Standar Operasional Prosedur* dalam pelaksanaan kebijakan?

Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak?

Jawab : “Pertama SOP tugasnya dulu ada petunjuk teknis yaitu juknis dan juklap (petunjuk pelaksana) tugasnya di diklat dengan pendidikan latihan, kemudian untuk solusinya yaitu meningkatkan sosialisasi Pergub tersebut dengan melibatkan banner-banner atau konten di LED/videotron tentang terbitnya Pergub tersebut.”

#### **Sumber-Sumber Kebijakan**

1. Bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pegawai dalam mengimplementasikan Pergub 4 Tahun 2022 tersebut? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak?

Jawab : “Sebelum ada pergub ini pun pegawai sudah familiar dengan penerapan pajak reklame khususnya di petugas pelayanan dan petugas pendataan nah yang di pendataan ini tugasnya adalah mencari objek baru kemudian mencari objek-objek reklame yang sudah tidak tayang, yang baru didaftarkan, yang tutup dan tidak tayang dihimbau untuk mereka bersurat kepada kantor pajak untuk memberitahu bahwa objek tersebut sudah tidak tayang karena kalau objek yang sudah tidak tayang tapi di sistem masih ada itu akan menyebabkan potensi yang gak valid karena di lapangannya udah gak tayang dan udah tutup dan wajib pajaknya gak melapor, jadi petugas pajak disini gak tau nih di sistem masih ada karena di sistem masih ada sehingga menjadi potensi nah itu yang menyebabkan target tinggi.

Kendalanya di UPPPD Kebayoran Baru ini gak imbang antara jumlah objek/luas wilayah dengan jumlah petugas. Solusinya harus sabar.”

2. Apakah ada anggaran khusus untuk penerapan Pergub ini di UPPPD Kebayoran Baru?

Jawab : “Kalau anggaran pengawasan untuk reklame itu ada tapi gak terlalu banyak.”

3. Apakah ada insentif dari Pergub No. 24 Tahun 2022?

Jawab : “Ada insentif berupa pengenaan 50% untuk pengenalan usaha.”

4. Apakah anggaran sudah cukup untuk mendorong pegawai di UPPPD Kebayoran Baru?

Jawab : “Menurut saya sih belum cukup ya, anggaran kita tuh untuk sosialisasi, pekan panutan dengan mengundang wajib pajak yang patuh dan taat serta anggaran untuk pemasangan stiker.”

#### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

1. Bagaimana struktur birokrasi di UPPPD Kebayoran Baru pak? Apa saja divisi yang terlibat dalam pelaksanaan pajak reklame pak?

Jawab : “Struktur birokrasi di UPPPD ini terdiri dari pemeroses pelayanan dan penetapan, pengolah data dan pendataan, dan pengolah data penagihan, kita diminta untuk bisa menangani semua jenis pajak karena sesuai dengan pergub untuk mencapai target yang telah ditetapkan.”

2. Apakah petugas diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak?

Jawab : “Harus sepengetahuan pimpinan dan sesuai aturan yang berlaku.”

3. Bagaimana hubungan antar para pelaksana kebijakan baik eksternal maupun internal? Kira-kira ada kendala ga pak? Bagaimana solusinya pak?

Jawab : “Kalau hubungan internalnya sih baik ya harmonis gak ada selisih paham. Kemudian hubungan eksternalnya juga baik ya dan harmonis serta saling bekerja sama satu sama lain terutama petugas Satpol PP yang melakukan penertiban dan pengawasan reklame agar tidak adanya reklame liar.”

### **Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana**

1. Bagaimana cara memotivasi para pegawai pak?

Jawab : “*Punishment and reward* ya jadi ada sanksi buat pegawai yang melanggar peraturan dan ada penghargaan buat pegawai yang berprestasi.”

2. Apakah dengan diberikannya insentif para pegawai akan semangat bekerja?

Jawab : “Iya dong kalau gak ada insentif waduh banyak cicilan.”

3. Bagaimana perilaku para pelaksana di lapangan pak? Perilakunya seperti apa? Apakah ada kendalanya pak? Apa yang sudah bapak lakukan dalam menyikapi perilaku para pegawai tersebut? Bagaimana solusinya?

Jawab : “Perilakunya baik, wajar, lazim, dan normal. Menyikapi perilaku para pegawai yaitu beradaptasi dengan lingkungan kerja, kebijakan pimpinan, dan menyesuaikan diri.”

### **Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan**

1. Bagaimana komunikasi antar petugas pelaksana? Apakah ada mis komunikasi petugas dan wajib pajak? Bagaimana solusinya pak?

Jawab : “Sejauh ini komunikasi antar petugas sih udah oke ya. Kalau mis komunikasi petugas dan wajib pajak itu kadang ada juga karena wajib pajak itu merasa pelayanannya lambat terlebih kemarin tuh ada transisi sistem baru ya nah masa-masa transisi ini kadang gak bisa mengakomodir inputan dari pelaksana di lapangan kemudian hilangnya data dan ada yang berubah datanya nah itu kendala tuh dan potensi untuk miskom ke wajib pajak. Solusinya kerjasama dengan bagian pusedkin di BAPENDA.”

2. Apakah para petugas pelaksana memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan?

Jawab : “Karena kalau gak punya komitmen kita dapet sanksi nih, sanksinya bisa teguran, tertulis, turun jabatan, mutasi keluar BAPENDA, dan sudah banyak sanksi keluar dari BAPENDA.”

### **Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

1. Bagaimana kesiapan masyarakat/wajib pajak menerima Pergub No.24 Tahun 2022? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak? Dari sisi sosial.

Jawab : “Karena pajak itu sifatnya memaksa jadi para wajib pajak itu suka/tidak suka mereka harus menyesuaikan dengan pergub 24, beberapa wajib pajak gak merasa puas karena NSR mengalami kenaikan yang signifikan, ya kita harus merangkul wajib pajak supaya taat bayar pajak, wajib pajak yang belum taat jadi kita kasih pemahaman tentang pergubnya dan tata caranya kan semua itu ada aturan-aturannya, kalau pajak reklame ada beberapa yang harus dipenuhi persyaratannya antara lain desainnya,



luasnya, dan kondisi di lapangannya. Solusinya ya mereka lebih baik merubah bentuk dan ukuran, sehingga mereka mampu untuk membayar pajak yang telah ditetapkan.”

2. Bagaimana kesiapan masyarakat/wajib pajak menerima Pergub No.24 Tahun 2022? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak? Dari sisi ekonomi.

Jawab : “Kalau liat dari indeks ekonomi berkembangnya selepas Covid-19 itu di tahun 2022 ini grafiknya turun mengacu pada hal itu bisa diasumsikan kemampuan ekonomi atau daya saing/ daya beli masyarakat itu menurun, sehingga bisa diasumsikan mereka tidak bisa menyesuaikan terbitnya Pergub No. 24 Tahun 2022.”

3. Apa saja bentuk dukungan Pemda terhadap DPRD terkait pajak reklame?

Jawab : “Pergub itu produk hukum yang diterbitkan melalui proses yang melibatkan antara eksekutif dan legislatif nah dukungannya ini adalah kontribusinya Pemda terhadap DPRD ini yaitu data yang terdapat di masyarakat dari segi kemampuan, kebutuhan PAD contohnya biaya kesehatan, biaya transportasi, biaya pendidikan itu dengan mengolektif data-data itu kemudian diajukan ke DPRD sehingga DPRD ini punya bahan untuk menerbitkan suatu peraturan yaitu Pergub No.24 Tahun 2022. Intinya dukungannya itu data di lapangan. Dan berusaha mencapai target penerimaan pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBD. Tetapi realisasi penerimaan kita di tahun 2022 ini belum mencapai target karena adanya Pergub 24 ini yang terlalu besar naiknya.

Nama Informan : Bapak Edi Cahyono (Papan *Billboard* Mandiri Sekuiritas)  
Wajib Pajak Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah  
(UPPPD) Kebayoran Baru

Tanggal Wawancara : 26 Juni 2023

---

---

### **Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran Kebijakan dan Tujuan Kebijakan**

1. Apakah dengan dikeluarkan Pergub No. 24 Tahun 2022 ini wajib pajak lebih taat membayar pajak? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya bapak/ibu?

Jawab : “Ya harus kita bayar karena sesuai dengan peraturan yang ada meskipun itu naik begitu besar sekali saya sempet kaget juga soalnya tahun lalu pajaknya kena sekitar belasan juta nah sekarang yang tahun 2022 itu kena 27jt. Kalau kendala ya gak puas ya karena naiknya terlalu tinggi. Solusinya Solusinya ya diharapkan adanya pergub baru contohnya banyak pengurangan-pengurangan atau insentif jadi meringankan beban pajak juga.”

### **Sumber-Sumber Kebijakan**

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kualitas sumber daya manusia di UPPPD Kebayoran Baru? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya bapak/ibu?

Jawab : “Menurut saya dari pelayanannya kadang masih ada *human error* ya contohnya salah penginputan data yang udah jadi di SKPD dan kalau di sistem *online* pajak reklame pengerjaannya lama banget.”

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah struktur birokrasi UPPPD Kebayoran Baru ini sudah mampu dalam menjalankan Kebijakan Pergub No. 24 Tahun 2022 tersebut?

Jawab : “Ya udah mampu kan Pergub ini harus dijalankan oleh pegawainya semua.”

### **Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana**

1. Bagaimana motivasi yang diberikan pegawai kepada wajib pajak? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak/bu?

Jawab : “Paling disuruh bayar tepat waktu sih jangan sampai kena denda ya walaupun naik tetap harus dibayar sesuai peraturan. Kalau untuk motivasi sendiri sih harusnya dikasih diskon misalnya ada penghapusan sanksi jadi meringankan juga.”

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sikap petugas pelaksana di UPPPD kebayoran Baru?

Jawab : “Sikapnya sudah baik dan jelas dalam menjelaskan.”

### **Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan**

1. Apakah koordinasi dan komunikasi petugas pelaksana dan wajib pajak sudah berjalan dengan baik? Bagaimana solusinya pak/bu?

Jawab : “Mungkin dari kita sendiri kadang persyaratan untuk pendaftaran belum lengkap. Solusinya harus benar-benar dibaca semua persyaratan jadi gak bolak-balik.”

2. Apakah ada mis komunikasi antara petugas pelaksana dan wajib pajak?  
Bagaimana solusinya pak/bu?

Jawab : “Mis komunikasinya ya saya gak tau nih tentang pergub ini jadi tiba-tiba pas mau bayar di loket baru dikasih tau mana naiknya tinggi banget. Mungkin kedepannya kalau ada pergub baru lagi ya minimal dikasih tau dulu lah.”

### **Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

1. Bagaimana kesiapan masyarakat/wajib pajak menerima Pergub No.24 Tahun 2022? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak? Dari sisi sosial.

Jawab : “Ya kaget tanpa sosialisasi dari BAPENDANYA, jadi saya tau pas mau perpanjangan aja langsung dikasih tau makanya saya kaget. Kalau saya sih gak protes mungkin kalau wajib pajak yang lain protes dan biasanya mereka copot reklame atau ngecilin reklamenya.”

2. Bagaimana kesiapan masyarakat/wajib pajak menerima Pergub No.24 Tahun 2022? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak? Dari sisi ekonomi.

Jawab : “Ya otomatis mengurangi keuntungan perusahaan karena kenaikannya sangat jauh kalau bisa naiknya jangan jauh-jauh.”

3. Apakah perusahaan bapak/ibu melakukan koneksi politik agar beban pajak yang dikeluarkan lebih sedikit?

Jawab : “Kalau untuk perusahaan saya sih engga ya.”

4. Apakah insentif yang tertera dalam Pergub No. 24 Tahun 2022 ini meringankan beban pajak? Dan menjadikan bapak/ibu taat membayar pajak?

Jawab : “Meringankan kalau untung sekarang gak tau kalau untuk tahun berikutnya dan cukup membantu sih tapi tetep naik nilai pajaknya, ya kalau saya sih tetep bayar karena itu tadi sudah aturan.



Nama Informan : Bapak Hengky Setiaji (Papan *Billboard* The Pakubuwono House) Wajib Pajak Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru

Tanggal Wawancara : 26 Juni 2023

---

---

### **Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran Kebijakan dan Tujuan Kebijakan**

1. Apakah dengan dikeluarkan Pergub No. 24 Tahun 2022 ini wajib pajak lebih taat membayar pajak? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya bapak/ibu?

Jawab : “Awalnya sih keberatan tapi kita tetep bayar cuma kaget aja kok tiba-tiba naik, naiknya juga tinggi banget tadinya tahun 2021 10jt nah sekarang 20jt, bukannya kecewa mungkin kitanya kurang informatif adanya kenaikan dari pembayaran pajak, ya kendalanya itu tadi kurangnya sosialisasi jadi saya gak tau kalau ada pergub ini. Solusinya jauh-jauh hari sebelum ada pergub ini harusnya dikasih tau ke wajib pajaknya bakalan ada kenaikan minimal jangan memutuskan sebelah pihak jadi harus dikasih tau juga perusahaan-perusahaan nih.”

### **Sumber-Sumber Kebijakan**

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kualitas sumber daya manusia di UPPPD Kebayoran Baru? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya bapak/ibu?

Jawab : “Kalau kualitas SDM yang ada disini bagus orang-orangnya informatif contohnya aja pajak saya tadi diinformasi sama pegawainya kalau udah lewat jatuh tempo nih dan urus perpanjangannya, tapi kalau untuk

pengerjaannya suka lama ya karena mereka kewalahan juga soalnya wajib pajaknya banyak nah pegawai di loket cuma ada 3. Solusi dari saya sih penambahan SDM.”

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah struktur birokrasi UPPPD Kebayoran Baru ini sudah mampu dalam menjalankan Kebijakan Pergub No. 24 Tahun 2022 tersebut?

Jawab : “Menurut saya sudah informatif ya tapi memang kurang sosialisasi sebelumnya.”

### **Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana**

1. Bagaimana motivasi yang diberikan pegawai kepada wajib pajak? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak/bu?

Jawab : “Pegawainya sih bilang ayok bayar pajak tahunan jatuh tempo tanggal 20 sekarang udah tanggal 26 kok belum bayar ya jangan sampe kena denda aja gitu.”

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sikap petugas pelaksana di UPPPD kebayoran Baru?

Jawab : “Sikapnya udah bagus kok dan informatif dalam menjelaskan.”

### **Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan**

1. Apakah koordinasi dan komunikasi petugas pelaksana dan wajib pajak sudah berjalan dengan baik? Bagaimana solusinya pak/bu?

Jawab : “Sudah baik kok.”



2. Apakah ada mis komunikasi antara petugas pelaksana dan wajib pajak?  
Bagaimana solusinya pak/bu?

Jawab : “Paling diinfokan terlebih dahulu yang tadinya tidak tau jadi tau biar gak kaget ini juga saya tau pas mau bayar di loket, ya gimana mau gak mau kita kan namanya wajib pajak ya kita nurut aja dengan peraturan yang ada.”

### **Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

1. Bagaimana kesiapan masyarakat/wajib pajak menerima Pergub No.24 Tahun 2022? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak? Dari sisi sosial.

Jawab : “Dari sisi sosial ya itu tadi kurang sosialisasi tentang kenaikan yang tinggi ini, jujur saya kaget banget ya namanya naik, naiknya drastis lagi tapi balik lagi mau gak mau kita sebagai wajib pajak peraturan seperti itu harus kita jalanin.”

2. Bagaimana kesiapan masyarakat/wajib pajak menerima Pergub No.24 Tahun 2022? Apakah ada kendala? Bagaimana solusinya pak? Dari sisi ekonomi.

Jawab : “Kalau dari sisi ekonomi keuntungan perusahaan sangat berpengaruh ya dengan adanya kenaikan ini, tapi kalo perusahaan kita bisa dibidang menengah keatas dengan biaya segitu kita ikutin aja peraturan yang ada takutnya seperti pajak UMKM yang biasa pasang reklame gitu takutnya gak kuat bayar misalnya reklamennya dicopot, kalo perusahaan kayak kita kan sekitar 20jt ohh yaudah ikutin aja ya walupun kaget.”

3. Apakah perusahaan bapak/ibu melakukan koneksi politik agar beban pajak yang dikeluarkan lebih sedikit?

Jawab : “Engga sih kalau kita.”

4. Apakah insentif yang tertera dalam Pergub No. 24 Tahun 2022 ini meringankan beban pajak? Dan menjadikan bapak/ibu taat membayar pajak?

Jawab : “Sangat meringankan ya meskipun emang harganya tetep naik.”



## LAMPIRAN HASIL TURNITIN

DELFILAROSA NOOR JAMILA

### ORIGINALITY REPORT

**10%** SIMILARITY INDEX      **10%** INTERNET SOURCES      **4%** PUBLICATIONS      **4%** STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://lib.ui.ac.id">lib.ui.ac.id</a> Internet Source	1%
<b>2</b>	<a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source	1%
<b>3</b>	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1%
<b>4</b>	<a href="http://jakarta.bpk.go.id">jakarta.bpk.go.id</a> Internet Source	<1%
<b>5</b>	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1%
<b>6</b>	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1%
<b>7</b>	<a href="http://tanyapajak1.wordpress.com">tanyapajak1.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
<b>8</b>	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1%
<b>9</b>	<a href="http://bapenda.jakarta.go.id">bapenda.jakarta.go.id</a> Internet Source	<1%